

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
NOMOR 7 TAHUN 2001**

TENTANG

**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
TAHUN 2001- 2005**

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan landasan dan pedoman bagi pelaksana pembangunan daerah Kabupaten Lampung Tengah sebagai bagian dari wilayah Propinsi Lampung yang merupakan bagian dari wilayah propinsi Lampung yang merupakan bagian Integral dan menyatukan diri dengan Pembangunan Nasional dan Regional maka perlu disusun pola dasar pembangunan daerah yang sekaligus merupakan penjabaran dari Garis-Garis Besar Haluan Negara berdasarkan ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor: IV/ MPR/ 1999
- b. bahwa untuk memberikan kejelasan arah dan pedoman pelaksanaan pembangunan daerah sebagai usaha untuk meningkatkan keserasian dan keselarasan pembangunan Daerah dengan pembangunan Nasional dan regional maka perlu adanya pola dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2001- 2005 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor : IV/ MPR/ 1999 Tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan propinsi Sumatera Selatan Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1956, Nomor 55, Tambahan Lembaran Nomor 1091), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 1821);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan Kabupaten Tingkat II Lampung Timur, dan Kotamadya Dati II Metro (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 46 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3825);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang pedoman

- Organisasi Perangkat Daerah;
7. Peraturan Daerah Nomor 108 tahun 2000 tentang tatacara Pertanggungjawaban Kepala Daerah;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 20 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Lampung Tengah Sebagai Daerah Otonom.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
LAMPUNG TENGAH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
LAMPUNG TENGAH TENTANG RENCANA STRATEGIS
PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
TAHUN 2001- 2005

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Garis-Garis Besar Haluan Negara yang selanjutnya di singkat GBHN adalah GBHN yang ditetapkan dalam ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor : IV/MPR/1999.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah.
- c. Bupati adalah Bupati Lampung Tengah.
- d. Dewan adalah Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya di singkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Lampung Tengah.
- e. Rencana Strategis yang selanjutnya di singkat RENSTRA adalah Renstra Kabupaten Lampung Tengah.
- f. Pola Dasar Pembangunan Daerah adalah Poldas Kabupaten Lampung Tengah.
- g. Wilayah Kabupaten adalah Wilayah Kabupaten Lampung Tengah.
- h. Program Pembangunan Daerah yang Selanjutnya disingkat Properda adalah Properda Kabupaten Lampung Tengah.

BAB II
SISTEMATIKA DAN PRINSIP RENSTRA

Bagian pertama
Sistematika

Pasal 2

- (1) Dengan peraturan daerah ini, Ditetapkan Renstra Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2001- 2005
- (2) Renstra dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut :